

# Kampanye Damai dan Ancaman Dualisme Politik

Angga Indraswara  
Pengajar Universitas Sanata Dharma

Pada Minggu, 23 September, kedua pasangan yang akan bersaing dalam Pemilu Presiden 2019 mengucapkan janji-janji yang tertuang dalam deklarasi kampanye damai.

Bagi penduduk negeri ini, deklarasi ini dilihat sebagai simbol komitmen kedua pasangan untuk tidak melakukan kampanye negatif yang dapat memecah belah bangsa ini. Keutuhan negeri ini memang belakangan ini cukup mencemaskan. Bercemin pada kampanye Pemilu 2014 dan situasi saat hitung cepat, juga Pilkada DKI 2017, dan aneka komentar di media sosial sampai hari-hari ini, tidak ada yang merasa bahwa telah terjadi bipolarisasi politik menjelang Pemilu Presiden 2019.

Tidak mengherankan jika banyak pihak sekarang ini memasang sikap berjaga. Apakah janji yang sudah diikrarkan ini dapat diwujudkan dalam kampanye yang sudah mulai berjalan?

Harapannya, jika kedua pasangan dan terutama pendukung masing-masing sungguh berpegang pada janji untuk melaksanakan kampanye damai, luka di masyarakat akibat laku politik selama beberapa tahun terakhir dapat perlahan sembuh. Sebaliknya, jika janji kampanye damai ini diabaikan, bipolarisasi yang kepalang muncul dan tampaknya sengaja dipelihara oleh beberapa pihak, dengan cepat dapat bergerak menjadi dualisme politik.

## Ancaman dualisme politik

Dualisme politik terjadi ketika persaingan politik tak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai negarawan atau politisi yang memiliki visi politik berbeda, tetapi se-

bagai *the evil enemy*, musuh yang jahat dan layak masuk neraka. Jika butuh contoh, simak saja unggahan seorang politisi di akun Instagramnya baru-baru ini yang memicu banyak protes: yang pilih capres A masuk surga! Yang tidak pilih capres itu dan yang menghina, berkata fitnah dan nyinyir, bakal masuk neraka. Kirakira begitu bunyinya.

Komentar semacam ini muncul karena dualisme dalam persaingan politik dalam pemilu dapat begitu cepat berubah seakan-akan lalu menjadi pertempuran di tingkat kosmik, antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tentu saja setiap kubu dengan berbagai cara akan mengklaim bahwa kelompoknya adalah laskar prajurit yang berdiri di bawah panji-panji kebaikan. Padahal, keduanya sama bencisnya dalam menghancurkan lawan politiknya.

Sikap bengis dengan mudah muncul karena dualisme dalam politik mengubah cara pandang terhadap lawan politik. Lawan politik tidak lagi hanya dilihat sebagai sosok politisi atau negarawan yang tidak kompeten, dan dengan demikian, tidak layak memenangkan pemilu. Dualisme menciptakan gambaran bahwa orang yang dianggap lawan adalah musuh yang jahat, dan karena itu, niscaya akan mendatangkan mala petaka bagi seluruh negeri.

Dalam arti yang lebih mendalam, dualisme politik menempatkan yang buruk/jahat bukan pada tindakan, niat atau sikap seorang politisi. Yang buruk/jahat adalah seluruh eksistensi sang lawan politik. Pesisir karena itu, ketika dualisme merasuk panggung politik masing-masing pihak yang bersaing akan berlaku bengis. Lawan politik dalam kancah pemilu tidak cukup hanya dikalahkan. Lawan politik harus dienyahkan dan ditutup kemungkinannya untuk terlibat dalam kontes pemilu.

Cara pandang terhadap lawan politik ini memperlihatkan prinsip dasar yang menggerakkan dualisme. Dalam paham dualisme,



SUPRIYANTO

kebaikan diyakini baru akan tercipta jika lawan politik tidak hanya dikalahkan, tetapi juga dilenyapkan. Itulah kenapa orang yang sudah dirasuki dualisme politik bersikap keji terhadap lawan politiknya. Ia meyakini, jika lawan politik sudah selesai dihabisi, ia dan kaumnya tidak lagi memiliki halangan untuk menegakkan kebaikan di negeri yang telah porak poranda akibat perpecahan politik. Itulah janji khas yang dikumandangkan mereka yang dirasuki dualisme.

Namun, di sini persis muncul kebuntuan. Sebagai sistem, dualisme mengandaikan kekuatan baik dan kekuatan buruk selalu ada. Penganutnya pun otomatis berpandangan demikian. Juga seandainya semua lawan politiknya sudah musnah, secara instingtif ia akan segera mencari lawan politik baru untuk dihabisi. Itulah kenapa politisi yang dirasuki dualisme dengan mudah menjadi diktator yang totaliter. Ia menganggap semua pihak yang berbeda pandangan sebagai musuh politik. Itulah persoalan mendasar yang melekat pada dualisme politik.

Persoalan inheren itu menjadikan dualisme politik ancaman yang serius bagi kehidupan demokrasi. Dualisme tidak hanya menutup ruang bagi kerja sama dan rekonsiliasi setelah pemilu.

Dualisme memecah kesatuan bangsa.

## Lawan sebagai sosok politisi

Ancaman dualisme dalam Pemilu Presiden 2019 bukan tidak ada, pun ketika deklarasi kampanye damai sudah diramaikan dengan semarak karnaval. Janji ini tentu berharga dan luhur karena melalui deklarasi ini kedua pasangan berikhtiar untuk memperlakukan lawan politik sebagai sosok politisi dan bukan sebagai penjemplan kuasa jahat yang harus dienyahkan.

Masalahnya adalah bagaimana membebaskan diri dari kecenderungan dualisme politik yang makin subur? Salah satu langkah awal adalah mengembalikan baik dan buruk ke dalam kategori moral. Apa maknanya? Sebagai makhluk moral, manusia tidak bisa lepas dari kesadaran akan baik dan buruk. Namun, keduanya bukan rumusan tentang apa manusia itu. Keduanya adalah kategori untuk menilai kualitas tindakan manusia. Sebagai contoh, politisi A tertangkap melakukan korupsi dan ia dihukum karena itu. Namun, bukan berarti seluruh eksistensinya adalah manifestasi kekuatan jahat. Yang jahat dan tidak bermoral adalah tindakannya.

Dalam konteks pemilu, menempatkan baik dan buruk ke dalam kategori moral memungkinkan politisi dan para pendukungnya bersaing secara sehat. Kalaupun ada kritik dan saling serang, itu dilakukan dalam menilai visi, kebijakan, dan tindakan, bukan menasar individu pesaing politik. Ini adalah tanda demokrasi yang sehat karena kampanye pemilu lalu menjadi arena bagi para calon pemimpin untuk saling menajamkan visi dalam rangka memajukan kebaikan hidup bersama. Saat itu terjadi, demokrasi sungguh menjadi penanda peradaban manusia.



## SURAT KEPADA REDAKSI

Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke [opini@kompas.id](mailto:opini@kompas.id) atau ke Redaksi Kompas Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

## Konservasi Berbungkus Kopi

Membaca rubrik Sosok, "Danurfan, Konservasi Berbungkus Kopi", di *Kompas* (22/9/2018), saya merasa tersentuh. Betapa tak lagi ada alasan menghindar dari urusan pelestarian lingkungan. Pesan lestari bisa masuk dalam setiap aspek kehidupan. Bungkus bisnis menjadi daya tarik yang bisa ditiru siapa saja. Apa pun itu, selalu bisa kembali ke urusan konservasi/pelestarian.

Danurfan patut diacungi jempol dalam perannya selaku individu mengubah ekosistem. Ini sebuah langkah kecil untuk perubahan besar. Bisnis sesuai dengan tren gaya hidup kini tentu impian banyak orang karena iming-imingnya untung. Terasa berbeda ketika bisnis bisa menggandeng dan menyejahterakan petani lokal. Idealisme Danurfan dengan Kedai Kopi Leuser semakin menampar karena membungkus gerakan konservasi.

Bagaimana dengan kita? Tanpa beban, kita membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik dalam setiap aspek hidup, berbisnis dengan menutup mata terhadap segala kerusakan lingkungan, dan meributkan selisih harga untuk perbaikan lingkungan.

Sudah saatnya kita beranjak, menatap masa depan yang lebih bersahabat dengan lingkungan sekitar. Ikut berprinsip, apa yang kita ambil dari alam harus kita kembalikan.

SAMIYATI  
Pustakawan ISI Yogyakarta

## Bensin dan Jeriken di Palangkaraya

Inilah yang sehari-hari terjadi pada banyak stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Palangkaraya. An-

## Tunjangan Sertifikasi 2018

Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mewakili eksekutif) dan anggota DPR (mewakili legislatif) atas kebijakan yang membuat tunjangan sertifikasi guru masih terus berjalan sampai sekarang.

Dengan adanya tunjangan sertifikasi, guru merasa semakin berarti dan mulia, kian semangat mengajar, bertambah kreatif, dan lebih inovatif mencerdaskan anak-anak bangsa.

Namun, pada 2018 ini, sudah dua triwulan tunjangan sertifikasi saya belum cair. Saya datang ke Kantor Diknas Provinsi Sulawesi Selatan untuk menanyakan perihal itu. Jawabannya, "Bersabarlah."

Saya membuat surat pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Kemdikbud, sampai saat ini belum ada jawaban. Namun, tunjangan sertifikasi guru-guru lain, baik PNS maupun non-PNS, sudah banyak yang cair.

Saya guru non-PNS yang mengajar 32 jam per minggu di sekolah swasta milik BUMN yang berstatus disamakan dengan akreditasi A-plus. Selain aturan Dinas Diknas yang harus dipatuhi, juga ada aturan perusahaan yang superketat dalam proses pembelajaran. Kami harus berada di sekolah setiap hari mulai pukul 07.30 hingga pukul 14.00. Terlambat masuk atau pulang lebih dini, kami akan dikenai potong gaji.

Saya mohon penjelasan mengapa sudah dua triwulan belum cair tunjangan sertifikasi saya.

ALI MOKHAMAD  
SMA Swasta Semen Tonasa, Jl Majennang, Tonasa 1, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan

trean panjang, beberapa di antaranya adalah konsumen yang membeli bensin dengan jeriken atau kendaraan bermotor. Pengelola SPBU membuat jalur khusus dan jam khusus untuk membeli BBM dengan jeriken atau kendaraan yang dimodifikasi sebagai tangki.

Semoga soal ini dapat segera terselesaikan. Ada solusi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penegak hukum.

FRANSISCO  
Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah

# Keindonesiaan dalam Perang Dingin Baru

Rene L Pattiradjawane

Ketua Centre for Chinese Studies-Indonesia; Associate Fellow pada The Habibie Center dan East West Institute

Ketika Presiden Joko Widodo bicara tentang ekonomi dunia di forum bergengsi World Economic Forum on ASEAN, Rabu (12/9/2018), di Hanoi, Vietnam, para hadirin terkemuka mendengarkannya. Menggunakan bahasa Inggris yang jelas dan mudah, bahkan Profesor Klaus Schwab, pendiri forum bergengsi yang mengadakan pertemuan tahunan di Davos, Swiss, menyimak secara saksama pidato Presiden Jokowi.

Yang menarik perhatian dari pidato Presiden Jokowi adalah acuannya tentang cerita layar lebar terbaru, *Avengers: Infinity War*. Dalam film ini, Thanos sebagai "Dark Lord" yang kuat, ekstrem, genosida, psikopat, keras, dan tiran ingin menguasai seluruh galaksi dan memerintahkan dua kekuatan tentara besar, Chitauri dan Outriders, dibantu unit elite yang dikenal sebagai Ordo Hitam. Karakter ciptaan dari 5.000 tokoh komik perusahaan Marvel yang dibeli oleh Walt Disney Company, dengan penjualan tiket bioskop mencapai 12 miliar dolar AS tahun lalu, adalah fiksi tentang "jagoan-jagoan" yang dikenal di negara-negara Barat.

Di satu sisi terasa ironis ketika *ghost writer* Jokowi mengacu pada narasi yang tidak berasal dari peradaban Asia, yang jauh lebih tua ketimbang antagonisme "baik versus jahat" di negara-negara Barat. Kita seolah-olah kehabisan narasi keindonesiaan dan Asiansasi yang menghadirkan kesejahteraan bersama, bukan melulu pada kekayaan sebagai referensi penting dalam globalisasi.

Di sisi lain, pesan yang ingin disampaikan Jokowi secara tegas mengingatkan kita bahwa Perang Dingin belum berakhir, tetapi tercerai-berai menjadi ribuan potongan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kemanusiaan. Kelemahan utama kebijakan luar negeri yang kita anut sekarang ini adalah ketidakmampuan kita secara tegas melakukan visualisasi kalau negara-negara Barat, khususnya AS, Uni Eropa, dan kebangkitan China, melemah pada berbagai spektrum kehidupan dan kemanusiaan.

Globalisasi yang kita kenal sekarang ini tercipta karena perang dagang dirोक oleh kebencian antara ras dan kepercayaan, baik ideologi maupun agama. Konsep-

si tentang ekstremisme, radikalisme, separatisme, dan terorisme menjadi acuan tindakan terhadap ancaman nasionalisme yang tumbuh bersamaan dengan semangat populis era awal abad ke-20. Migrasi manusia ke berbagai wilayah dunia dianggap mengganggu ekosistensinya negara. Hasilnya, dunia yang kita kenal kini berada dalam kekacauan berkepanjangan.

## Seperangkat kondisi

Pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya Presiden Jokowi dan "kawan-kawan Avengers" mencegah perang tidak terbatas dalam lakon *Avengers: Infinity War*? Apakah "rekan Avengers" dalam pidato Presiden Jokowi bisa diartikulasikan sebagai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak lagi bertumpu pada prinsip bebas-aktif, mulai melihat kebutuhan baru membangun aliansi, melupakan gagasan Nawacita. Memilih antara tumpuan pada neoliberalisme atau mengambil preposisi yang sama sekali baru, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia?

Ketika dasar-dasar ekonomi pasar global dan demokrasi liberal yang diprakarsai Presiden AS Ronald Reagan, PM Inggris Margaret Thatcher, dan PM Jepang Yasuhiro Nakasone, pada awal 1990-an, tidak menciptakan marginalisasi yang sangat akut. Globalisasi yang dicita-citakan ketiga pemimpin dunia ini mengandung kegagalan dan terkungkung oleh keputusan, kehilangan semuanya, termasuk kekayaan yang memang tidak banyak. Ketimpangan ekonomi dan perdagangan jadi semakin nyata di abad ke-21 ini.

Mungkin benar apa yang ditulis Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieterszoon Coen, yang memegang kendali ekonomi dan perdagangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda, dalam surat kepada de Heren Zeventien (Dewan-17) pada 1612 tentang situasi Asia. Coen dalam surat kepada Dewan-17 menulis, "...is het niet mogelijk de handel zonder de oorlog, noch de oorlog zonder de handel vol te houden en voert te zetten..." (adalah tidak mungkin berdagang tanpa perang atau perang tanpa melanjutkan perdagangan).

Ini dilema yang dihadapi dunia

sekarang. Perebutan hegemoni global yang sedang berlangsung terkonsentrasi pada masalah ekonomi dan perdagangan. Benar bahwa globalisasi telah mencapai titik di mana berbagai produksi sudah mampu memberi makanan, pakaian, transportasi, dan menghubungkan semua orang di dunia ini. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada yang tahu bagaimana berbagi produksi tersebut dilakukan secara adil, bahkan secara berkelanjutan.

Mantan anggota Dewan Eksekutif Bundesbank, bank sentral Jerman, Thilo Sarrazin, dalam bukunya *Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen* (Indonesia Singkirkan Dirinya Sendiri: Bagaimana Kita Membahayakan Negara) mengingatkan, formasi sosial dalam sejarah mana pun memiliki apa yang disebutnya "einem Set von Bedingungen" (seperangkat kondisi), kalau diubah juga akan mengubah struktur masyarakat. Perangkat ini, menurut Sarrazin, adalah kondisi iklim, geografis, teknologi, budaya, kekuasaan politik, dan demografi yang ikut menentukan percepatan terjadinya perubahan berbagai bangsa.

## Kesabaran revolusioner

Dalam kondisi ini, kita perlu menanyakan arah dan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia paling tidak sampai 2028. Apakah kebijakan "Making Indonesia 4.0" seperti diutarakan Presiden Jokowi dalam pidatonya melawan Thanos sepele dengan pola pikir kita tentang narasi Revolusi Industri 4.0? Di mana sinkronisasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam revolusi abad ke-21 ini? Banyak pertanyaan yang perlu dirumuskan terkait soal ini.

Kenapa? Karena narasi Revolusi Industri 4.0 memiliki apa yang bisa kita sebut sebagai *les defaults de ses qualites*, suatu cacatan kualitas yang tidak menjawab narasi dasar tentang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan perdagangan, dan demokrasi beradab. Para pendiri Indonesia, 70 tahun lalu, selalu mengingatkan, "*Geduld is het sterkste wapen van een revolutionair*" (kesabaran adalah senjata yang paling kuat bagi seorang revolusioner). Demikian juga dengan Revolusi Industri 4.0 dalam konteks keindonesiaan.



# Congratulations

## PT. DUNIA EXPRESS TRANSINDO

### Soft Opening Cold Storage Sunter

### October 5<sup>th</sup>, 2018




PT. BELGANA PERMATA ABADI

Email : [belgana.contractor@gmail.com](mailto:belgana.contractor@gmail.com)  
Telp : +62 (21) 295 22122 / 23  
Web : [www.belgana.com](http://www.belgana.com)